

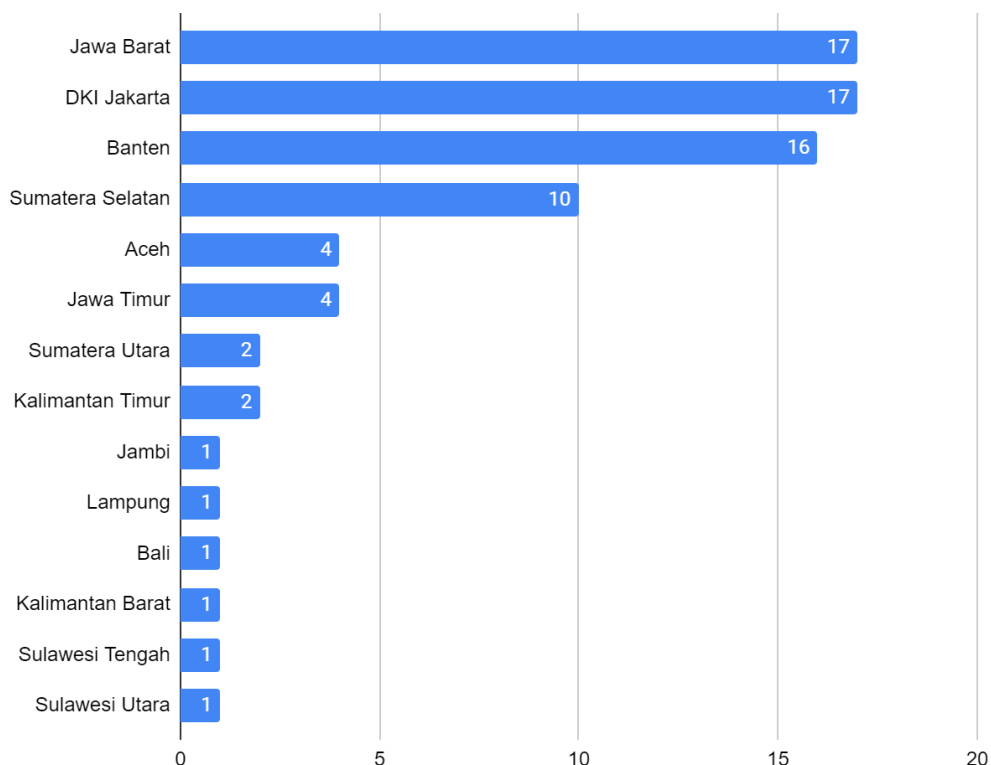
## Laporan Pemutakhiran Data Advokasi Insentif dan Santunan Jilid V Periode 30 Juni 2021 - 31 Juli 2021

Dalam rentang 30 Juni 2021 - 31 Juli 2021, LaporCovid-19 (melalui [Google form](#)) menerima 136 laporan tentang dana insentif tenaga kesehatan yang tidak kunjung dibayarkan, baik di fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun swasta. Sehingga, secara total terdapat 5521 laporan masalah pendistribusian dan pencairan insentif dan santunan untuk tenaga kesehatan sejak 8 Januari 2021 hingga 31 Juli 2021.

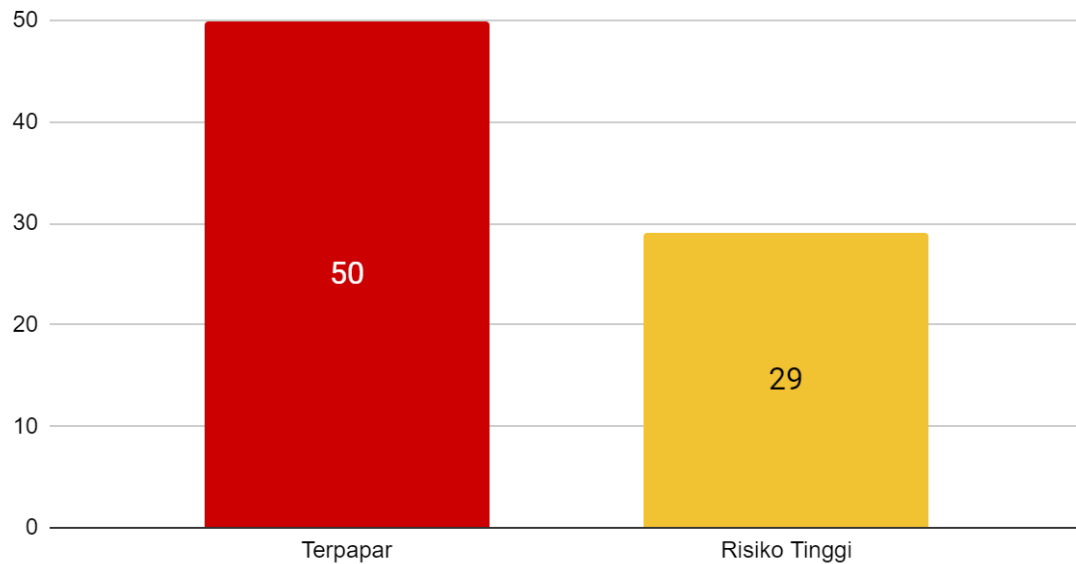
Laporan ini didapatkan dari para tenaga kesehatan (nakes) yang tersebar di berbagai provinsi, di antaranya: Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, hingga Sumatera Selatan. Kami bekerja sama dengan IDI, IBI, PPNI, dan PATELKI dalam pengumpulan data ini.

Wilayah Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten menjadi tiga wilayah dengan keluhan mengenai insentif terbanyak yang dilaporkan oleh para nakes.

Sebaran Laporan Tenaga Kesehatan Belum Menerima Insentif

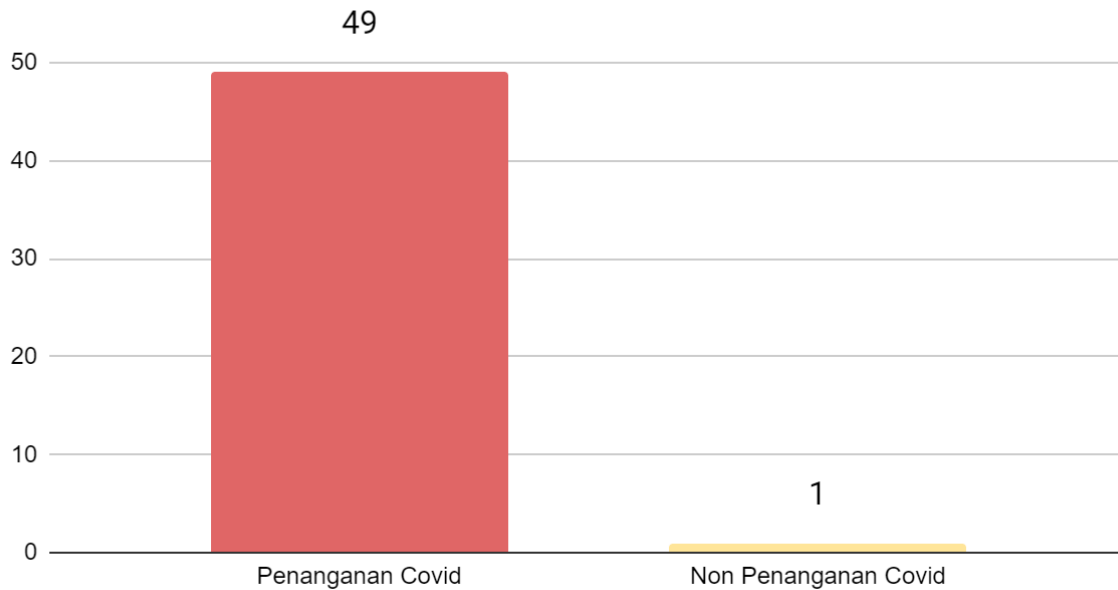


### Keadaan Nakes Belum Menerima Insentif



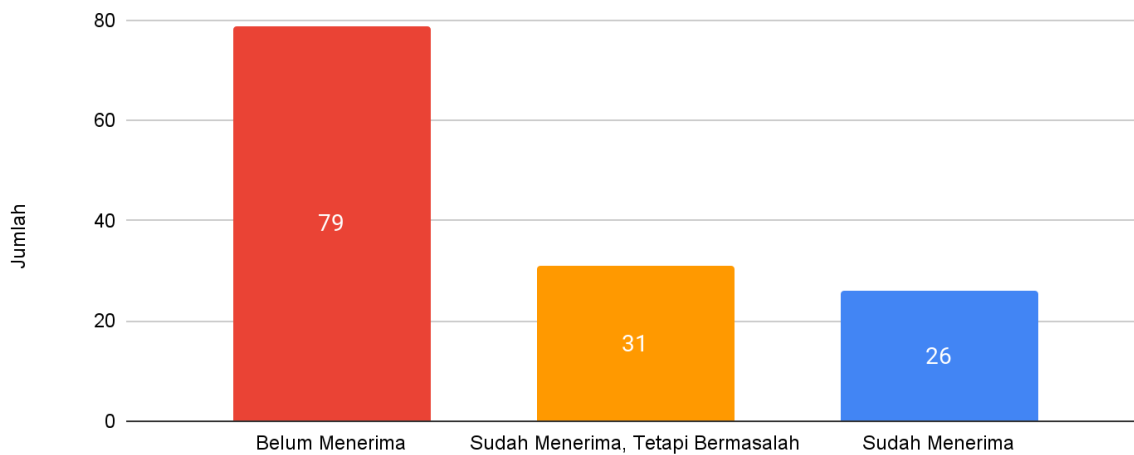
Dari 79 laporan tenaga kesehatan yang belum mendapatkan insentif karena berbagai masalah, 50 diantaranya pernah terinfeksi Covid-19, sedangkan 29 lainnya belum terinfeksi namun memiliki risiko tinggi. Artinya, mereka yang bekerja melayani pasien di fasilitas kesehatan di saat lonjakan kasus memiliki potensi tinggi terpapar, namun tidak mendapatkan dana insentif yang seharusnya diberikan oleh pemerintah sesuai amanat Keputusan Menteri Kesehatan No.HK. 01. 07/ Menkes/2539/2020.

### Keadaan Nakes Belum Menerima Insentif dan Terpapar



### Jenis Masalah Insentif

Periode 30 Juni 2021 - 31 Juli 2021



Sebanyak 79 nakes melaporkan, belum menerima insentif sama sekali sejak bertugas. Selain itu, terdapat 31 nakes yang mengaku sudah menerima, namun insentif tidak kembali didapatkan pada periode berikutnya atau menerima hanya dalam kurun waktu beberapa bulan saja. Berikut beberapa laporan diterima oleh LaporCovid-19 mengenai penyaluran insentif yang tidak teratur:

*"Saya menerima waktu saya ditempatkan di IGD dengan nominal 1000000 hanya 1 bulan. Insentif kami baru dicairkan sampai bulan Juli 2020 sedangkan Agustus 2020 sampai dengan sekarang belum ada dicairkan. Padahal saya tugas di ruang covid sejak Januari 2021 sampai dengan sekarang."* - Bidan di Rumah Sakit Milik Pemerintah Daerah, Juli 2021

*"Sudah diterima hanya di tahun 2020 dari bulan Agustus sampai Desember belum diberikan termasuk tahun 2021 belum sama sekali."* ATLM di Rumah Sakit Milik Pemerintah Daerah, Juli 2021

*"Sejak awal (bulan Desember 2020 hingga saat ini Juli 2021 belum menerima 1 rupiah pun)." Dokter Umum di Rumah Sakit Swasta, Juli 2021*

Pemotongan insentif oleh pihak manajemen fasilitas kesehatan masih terus terjadi. Berikut isi laporan yang diterima:

*"Insentif yg sudah diterima di rekening, harus dikembalikan lagi ke puskesmas, lalu dibagi rata dg seluruh pegawai. tentunya hal ini tidak sesuai dg aturan dari kemenkes. adanya bagi-bagi insentif selain nakes yg menangani covid, seyogyanya tidak adil bagi nakes yg menangani covid dg beban kerja yg jauh lebih berat daripada yg lain. harusnya ada kebijakan dari dewan pengatur dan pengawas insentif bagi nakes yg menangani covid agar tidak ada lagi pemotongan oleh puskesmas. kenyataannya di lapangan, nakes yg mendapatkan insentif tidak mampu menolak jika tidak ingin dipotong. kebijakan internal puskesmas seharusnya selaras dg aturan kemenkes. insentif covid merupakan penghargaan etos kerja bagi nakes yang melakukan penanganan covid."* Nakes di Puskesmas, Juli 2021

### Jenis Masalah Insentif

